

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa-analisa yang telah dilakukan oleh peneliti.

V.1. Kesimpulan

Setelah menelaah fakta-fakta setiap pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Pertama, atas pertanyaan penelitian pertama apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah berkontribusi memberi ruang partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh, maka berdasarkan fakta-fakta dan analisis pembahasan di atas, menyimpulkan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang mewajibkan penerapan 30% keterwakilan perempuan dalam struktur partai, telah berkontribusi atau “memaksa” partai politik, termasuk Partai Buruh membuka ruang partisipasi luas untuk merekrut buruh perempuan. Partai Buruh merekrut mereka berada dalam jajaran struktur kepengurusan di level nasional namun belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini karena dorongan partisipasi perempuan masih sebatas upaya memenuhi syarat administrasi untuk meloloskan Partai Buruh menjadi peserta pemilu 2024.

Kedua, atas pertanyaan bagaimana latar belakang dan proses pendirian kembali Partai Buruh pada 2020 – 2021, berdasarkan fakta-fakta dan analisis dari pembahasan di atas maka pendirian kembali Partai Buruh utamanya dilatarbelakangi oleh fakta pemiskinan terstruktur (sistemik) yang dilegalkan oleh hukum dan upaya konsolidasi terus menerus gerakan buruh dan

rakyat. Kedua hal tersebut berhasil mengerucutkan kesimpulan bahwa Partai Buruh adalah kebutuhan yang mesti dibangun, meskipun berhadapan dengan hukum *existing* yang cukup berat. Harus diakui bahwa partai menghadapi syarat administrasi yang cukup rumit untuk lolos sebagai peserta pemilu. Proses menghidupkan kembali Partai Buruh ini juga melibatkan buruh perempuan di dalamnya, namun perannya belum terlalu mendapat ruang untuk muncul secara publik.

Ketiga, atas pertanyaan bagaimana keterlibatan buruh perempuan dalam pendirian dan pasca pendirian Partai Buruh, maka berdasarkan fakta-fakta dan analisis dari pembahasan di bab 4 di atas, bahwa keterlibatan buruh perempuan saat pendirian dan pasca pendirian penerapannya berbeda-beda, tergantung kultur atau budaya yang menjadi pola di masing-masing organisasi. Ada yang partisipasinya bersifat substantif, dimana buruh perempuan betul-betul memperoleh ruang untuk pengambilan keputusan seperti *citizen control* dalam teori Arnstein. Sebaliknya, ada juga yang penerapan partisipasinya semu dengan kategori peredaman (*placation*), hanya formalitas sekedar komunikasi sepintas lalu. Keduanya berkontribusi pada ketidakmaksimalan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh partai. Selain itu, partisipasi buruh perempuan juga masih terkendala dengan budaya patriarki yang mempengaruhi ketidakpercayaan diri perempuan dan mekanisme yang belum *clear* pada masing-masing organisasi yang mempengaruhi cara pandang dalam melihat dan mempraktikkan kesetaraan dan buruh perempuan mempunyai kekhususan yang mesti mendapat afirmasi. Secara umum, penerapan partisipasi buruh perempuan dalam Partai Buruh belum memenuhi partisipasi substantif.

V.2. Saran-saran

Atas kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai partai yang baru dihidupkan kembali di 2021, Partai Buruh memperoleh moment untuk membuat sistematika kepartaian dengan partisipatif substantif pada kader perempuannya agar menjadi pola. Hal ini yang mulai bisa dibenahi sambil berproses dalam melaksanakan pemilu di 2024. Pola baik ini akan menjadi tradisi (kebiasaan) sebagai strategi untuk dapat memajukan dan menambah kader-kader perempuannya baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Pelibatan buruh perempuan dalam Partai Buruh adalah langkah maju yang layak mendapat apresiasi. Sungguhpun begitu, proses ideologisasi bertema kesetaraan gender perlu menjadi pola baik di level nasional sampai wilayah, baik bagi pengurus maupun anggota dan simpatisan partai yang laki-laki, perempuan, maupun gender lain. Hal ini perlu dilakukan sebagai bekal mempraktikkan transparansi perekrutan kader perempuan untuk mewujudkan partisipasi substantif. Selain itu juga upaya menambah pengetahuan, penambahan kapasitas untuk praktik membangun partai yang menjunjung tinggi kesetaraan pada perempuan. Proses ideologisasi ini juga mesti mendapat pantauan dalam praktik keseharian berpartai.
3. Partai Buruh perlu berupaya menggali problem-problem khusus yang dihadapi oleh buruh perempuan sehingga ada kebijakan afirmasi yang perlu diputuskan oleh partai. Hal ini untuk mendorong praktik partisipasi substantif buruh perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh partai.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- BBC News Indonesia, “Omnibus Law: DPR sahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengapa dituding 'siasat' perbaiki UU Cipta Kerja?” [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186), 24 Mei 2022, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.
- CNBC Indonesia, “Omnibus Law: Semua Pekerjaan Bisa Outsourcing, Tiada Batas!”, [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007130006-4-192493/omnibus-law-semua-pekerjaan-bisa-outsourcing-tiada), 7 Oktober 2020, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007130006-4-192493/omnibus-law-semua-pekerjaan-bisa-outsourcing-tiada>.
- Dewi Padmawati, Retna “Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian” FK-KMK UGM, diakses melalui <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian/#:~:text=%E2%80%9CObservasi%20partisipasi%20adalah%20salah%20satu,yang%20panjang%2C%20untuk%20mendapatkan%20pemahaman> pada 21 Juli 2023.
- Faiz, Pan Muhammad, “Teori Keadilan John Rawls” diakses pada 2 Agustus 2023 melalui https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls'_Theory_of_Justice.
- Fither, Kgs Chris “Ombudsman dan Paradoks Pengawasan Ketenagakerjaan” Ombudsman 29 Juni 2021, diakses pada 29 Juni 2023 melalui <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-dan-paradoks-pengawasan-ketenagakerjaan>.
- Kominfo, “Komitmen Pemerintah Wujudkan Bonus Demografi yang Berkualitas”, [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita), 27 Juni 2020, diakses pada 16 Maret 2023 melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita>.
- LRC-KJHAM, “OMNIBUS LAW: PERBUDAKAN MODERN DAN KERENTANAN PEKERJA PEREMPUAN”, 24 September 2020, diakses melalui <https://lrckjham.id/courses/omnibus-law-perbudakan-modern-dan-kerentanan-pekerja-perempuan/>.

Majalah Tempo, Pengusaha Kuasai Parlemen, *Majalah Tempo*, 5 Oktober 2019, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>.

Nova, Dewi, "Tiga Soko Guru Mengkreasi Serikat Buruh Responsif Gender" *Storimini, Jelastoria.id*, 13 Juni 2023, diakses pada 26 Juni 2023 melalui <https://www.jalastoria.id/tiga-soko-guru-mengkreasi-serikat-buruh-responsif-gender/>.

Nurzali, Ferry "Partai Buruh Optimis Nembus Senayan" *partaiburuh.or.id* diakses pada 15 Maret 2023 melalui <https://partaiburuh.or.id/berita/216>.

Presiden RI, "Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi" *presidenri.go.id* 19 November 2020, diakses pada 13 Juni 2023 melalui: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-terhadap-iklim-usaha-dan-investasi/>.

Sandra, Amalia Luky, "Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa" Pusat Riset Politik BRIN, diakses pada 19 Juli 2023 melalui: <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa/>.

TURC, "Sejarah Gerakan Buruh Indonesia", *turc.or.id*, diakses pada 14 Maret 2022 melalui <https://turc.or.id/2015/04/22/sejarah-gerakah-buruh-indonesia/>.

Vidya Andika, Pundarika "Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik" *iap2.or.id- International Association for Public Participation Indonesia*, 11 Januari 2022, diakses pada 30 Mei 2023 melalui <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>.

Buku

Adhianto, Muhamad Fandrian, "*Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Dalam Kerangka Heteronom dan Otonom*" PT Pena Persada Kerta Utama, Jawa Tengah, 2023.

Fadli Ramadhanil, Khoirunnisa Agustyati, Heroik M Pratama, "*Panduan Pemantauan Kebijakan Berbasis Pengarusutamaan Gender di Lembaga Legislatif*", Perkumpulan untuk

- Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta, 2019.
- Fildzah Izzati, Fatimah, “*Problem “kerja Perempuan” dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan*”, *Jurnal Perempuan* Vol 24 No.2 Mei 2019.
- Irianto, Sulistyowati “*Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*,” KAJIAN SOSIO LEGAL, Pustaka Larasan Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B Denpasar, Bali, 2012.
- Margret Anna, Dirga Ardiansa, Heru Samosir, dan Mia Novitasari, “*Melampaui Angka Menuju Perempuan Berdaya*” Cakra Wikara Indonesia, Jakarta, 2023.
- PSHK, “*LEGISLASI MASA PANDEMI: CATATAN KINERJA LEGISLASI DPR 2020*”, Hlm 186, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta, 2020.
- Siregar, Fritz Edward “*Merawat Keadilan Prosedural*” Keadilan Pemilu, PT Raja Grafindo Persada, Depok -2022.
- Zulfiyandi, Franciscus Anton Wirawan, Nikhen Pratiwi Sekar Tanjung, Roselina Yolanda, M. Zaini, Devi Andrian, Khairina Syafitri, Gilang Amaldi, I Nyoman Bagus Sidantha, “*Ketenagakerjaan dalam Data, edisi 4 2021*” (Jakarta, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2021).

Jurnal

- Habibah, St “Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik,” (*Jurnal Al- Maiyyah. Volume 8 No.2 Juli-Desember 2015*), melalui:
[https://media.neliti.com/media/publications/285757-partisipasi-dan-perempuan-dalam-pa-bd35e13a.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/285757-partisipasi-dan-peran-perempuan-dalam-pa-bd35e13a.pdf).
- Hanifah, Ida “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum” *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No.2 – Juni 2020*, diakses melalui
https://jdihn.go.id/files/804/jurnal%20hukum_2020_669-2256-1-pb.pdf.
- Israfil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya).” *Jurnal Pusaka, Vol. 5, 2017*.

- Maryono, Dwi dan Muhammad Azhar, “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata” *Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018*.
- Scales, Ann “FEMINIST LEGAL METHOD: NOT SO SCARY”, *UCLA Women's Law Journal, Vol 2.1, University of California, 1992*.
- Sundari, Any “PETA SEBARAN DAN PERSPEKTIF ISU PEREMPUAN CALON PEREMPUAN PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015”, *Jurnal Etika & Pemilu, Vol 1, No. 4, Desember 2015*, melalui https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/jurnal_etika_voll_no4.pdf.
- Suryani, Ana Sabhana Azmym, “Partisipasi Politik Buruh Perempuan: Analisis Terhadap Keterlibatan Buruh Perempuan dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP KEP-SPSI” *Yinyang, Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak Vol 15 No.1, Januari – Juni 2020*, melalui <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/3544>.
- Wahyuni, Very “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender,” *Jurnal Politik Islam Vol.1 No.1, 2018* diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/266979356.pdf>.

Disertasi:

- Aini, Nurul “Partisipasi Politik Buruh Perempuan Pasca Orde Baru Studi Kasus Pabrik Garmen PT Tongkyung Makmur Abadi Jakarta” Disertasi, Universitas Indonesia, diakses melalui <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=91389>.

Dokumen lain

Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh

Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh No.: A02/SK.PUS/EXCO_PB/X/2021 tentang Susunan Pengurus Pleno Komite Eksekutif (Executive Committee - Exco) Partai Buruh Periode 2021 – 2026

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan revisinya.

Wawancara:

Afiana, Anie, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 30 Juni 2023 secara daring melalui Whatsapp.

Anggraeni, Lita, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 1 Juni 2023 secara daring melalui Whatsapp.

Asih, Ika, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 6 Mei 2023 secara tertulis via Whatsapp.

Fajar, Adityo, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 26 April 2023 secara daring via zoom.

Febrianti, Roza, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 29 April 2023 secara tertulis melalui Whatsapp.

Gugun Muhammad, Guntoro, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 29 Mei 2023 secara daring via Whatsapp.

IL, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 27 April 2023 secara langsung, di Jakarta.

Ilhamsyah, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 30 April 2023 secara daring via zoom.

Iqbal, Said, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 3 Mei 2023 secara langsung di Jakarta.

Istakhori, Khamid, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 24 Mei 2023 secara daring via email.

Jumiyem, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 29 Mei 2023 secara tertulis via Whatsapp.

Margret, Anna, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 28 Juli 2023 secara daring melalui Whatsapp.

Mundiah, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 26 April 2023 secara daring melalui zoom.

Pakpahan, Dartha, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 18 Mei 2023 secara daring via zoom.

Rastingkem, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 29 April 2023 secara daring melalui zoom.

Rositawati, Dian, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 29 Juli 2023 secara daring melalui zoom.

Savirani, amalinda, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 28 Juli 2023 secara daring melalui Whatsapp.

Supriyadi, Agus. 2023. Wawancara diselenggarakan pada 28 Mei 2023 secara daring.

Susanti, Bivitri, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 23 Mei 2023 secara langsung di Jakarta.

Trisnanti, Dian Septi, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 7 Maret 2023 secara langsung di Jakarta.

Wahyuningsih, Endang, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 24 Mei 2023 secara tertulis melalui Whatsapp.

YK, 2023. Wawancara diselenggarakan pada 25 April 2023 secara langsung, di Jakarta.

Lampiran 1: list pertanyaan untuk narasumber:

1. Bagaimana proses serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Partai Buruh memutuskan untuk membangun kembali partai buruh?
2. Bagaimana persetujuan dengan anggota? Melalui kongres atau konferensi? Bagaimana dengan persetujuan buruh di tingkat pabrik atau tempat kerja? Mekanismenya seperti apa?
3. Apakah bentuk partisipasi buruh perempuan dalam pengambilan keputusan itu?
4. Apa tanggapan, respon, reaksi buruh perempuan saat pengambilan keputusan itu?
5. Bagaimana proses buruh perempuan untuk menjadi pengurus Partai Buruh?
6. Apa alasan khusus kenapa buruh perempuan mendukung pembangunan Partai Buruh dan bersedia menjadi pengurus?
7. Apakah buruh perempuan merasa bahwa Partai Buruh mengakomodir kepentingan buruh perempuan? Kenapa?
8. Apakah ada mandat khusus dari masing-masing organisasi pendukung Partai Buruh untuk terlibat aktif di Partai Buruh? Bentuknya seperti apa?
9. Bagaimana keterlibatan buruh perempuan dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk meloloskan Partai Buruh menjadi peserta pemilu di 2024?
10. Bagaimana keterlibatan atau partisipasi buruh perempuan dalam kongres Oktober 2020?
11. Bagaimana keterlibatan atau partisipasi buruh perempuan khususnya Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dalam rakernas?
12. Agenda apa yang pernah diikuti dan paling berkesan (sebagai perempuan) Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh yang diselenggarakan Partai Buruh?

13. Kendala apa yang dihadapi oleh Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh selama aktif di Partai Buruh? (dispensasi, surat tugas, surat instruksi, dll?)
14. Upaya atau dorongan apa yang dilakukan oleh Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh untuk terlibat aktif dalam Partai Buruh?
15. Upaya apa yang dilakukan oleh Partai Buruh untuk mendorong kemajuan dan partisipasi buruh perempuan?

Lampiran 2: List Narasumber

1. Adityo Fajar, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh.
2. Agus Supriyadi, Wakil Presiden Partai Buruh
3. Amalinda Savirani, Dosen Universitas Gajah Mada – Yogyakarta.
4. Anie Afiana, Dewan Pengurus Nasional Serikat Petani Indonesia.
5. Anna Margret, Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI).
6. Bivitri Susanti, ahli hukum Tata Negara sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
7. Dartha Pakpahan, ketua umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sekaligus anak almarhum Muchtar Pakpahan.
8. Dian Rosita (Tita), pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera sekaligus peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).
9. Dian Septi Trisnanti, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) sekaligus Ketua Bidang Perempuan KPBI.
10. EW, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Serikat Pekerja.
11. Guntoro Gugun Muhammad, Sekretaris Bidang PRT, Buruh Migran, dan Miskin Kota Partai Buruh.
12. Ika Asih, Deputy Bidang Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Bekasi.
13. IL, salah satu Deputy Bidang pada Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dan Pengurus Perempuan Serikat.
14. Ilhamsyah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh.

15. Jumiyeem, Deputi Bidang Pekerja Rumah Tangga Partai Buruh (PRT).
16. Khamid Istakhori, Program Officer *Building and Wood Workers' International (BWI)* Regional Asia Pasifik/
17. Lita Anggraeni, Koordinator Jala PRT sekaligus Ketua Bidang PRT, Buruh Migran, dan Miskin Kota Partai Buruh.
18. Mundiah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Sosial Partai Buruh.
19. Rastingkem, Deputi Bidang Kalimantan 1 Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dan Bendahara DPP FSP KEP KSPI.
20. Roza Febrianti, Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata Partai Buruh sekaligus Pengurus Dewan Eksekutif Nasional FSPMI.
21. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
22. YK, Wasekjen Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh.